

TAJUK RENCANA

Kesalahan Persepsi Terhadap Baznas

USIA Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memang masih tergolong belia. Dibentuk berdasarkan UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang ditetapkan pada 25 November 2011. Karena itu masih banyak orang yang sering salah persepsi terhadap Baznas, baik dari kalangan elite maupun awal. Misalnya, orang kadang salah dengan Basamas. Ada juga yang beranggapan Baznas sama, atau mendudukkan sejajar, dengan organisasi masyarakat (ormas) bahkan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Baznas itu berbeda dengan ormas atau LSM. Tidak bisa disamakan atau disejajarkan. Baznas itu bagian dari pemerintah," kata Ketua Baznas RI Prof Dr KH Noor Achmad pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional 2022 Baznas di Holiday Inn Kemayoran Jakarta, sebagaimana dimuat di koran ini, Kamis (25/8).

Karena dibentuk berdasarkan undang-undang, maka Baznas termasuk lembaga pemerintah non struktural (LPNS). Untuk tingkat pusat, pimpinan Baznas diangkat dengan SK Presiden. Kemudian pimpinan Baznas Provinsi dengan SK Gubernur dan pimpinan Baznas Kabupaten/Kota diangkat dengan SK Bupati/Walikota.

Dengan begitu, maka jelas sekali perbedaannya dengan ormas ataupun LSM. Apalagi tugasnya memang membantu pemerintah, antara lain meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Karena itu Baznas harus bersinergi dengan pemerintah setempat, bahkan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), Baznas perlu dilibatkan sehingga kegiatannya seiring dengan program pemerintah. Dari forum itu pengurus Baznas bisa mengetahui program pemerintah yang harus diback-up.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mempunyai tugas fasilitasi terhadap Baznas. Sebab, tanpa adanya fasilitas pemerintah, pengurus Baznas tidak akan bisa menjalankan tugasnya se-

cara baik. Prof Noor Achmad mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap Baznas sudah semakin baik. Dicontohkan kalau dulu kantor Baznas sering diletakkan di pojok masjid, tetapi sekarang sudah banyak Baznas yang diberi kantor cukup strategis.

Termasuk dalam pemberian dana hibah untuk operasional Baznas. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pada 27 Desember 2018. Hanya saja, besarnya dana hibah yang diberikan setiap provinsi masih bervariasi. Ada yang hanya puluhan juta rupiah, ratusan juta rupiah, bahkan beberapa provinsi memberi hibah di atas Rp 1 miliar.

Yang pasti, adanya dana hibah akan sangat mensupport kegiatan Baznas, sehingga hasil pengumpulan akan semakin banyak. Dengan banyaknya zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lain (DSKL), maka akan semakin banyak pula yang bisa dilakukan Baznas untuk masyarakat sehingga mereka yang memperoleh manfaat juga kian banyak.

Misalnya saja, perolehan ZIS dan DSKL tahun 2022 ini secara nasional ditarget mencapai Rp 26 triliun. Dana dana sebesar itu diproyeksikan ada 47 juta orang penerima manfaat dan 400 ribu di antaranya diharapkan terangkat ekonominya sehingga bukan lagi tergolong *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat), tetapi menjadi *muzakki* atau orang yang sudah berkewajiban zakat karena hartanya sudah mencapai *nishab* atau batas minimal harus mengeluarkan zakat.

Kita berharap, pemahaman semua orang terhadap Baznas menjadi benar dan selanjutnya bisa memposisikannya secara benar juga. Lebih dari itu, para kaum muslimin dan muslimat yang sudah berkewajiban zakat semoga semakin sadar untuk berzakat dan menyalurkannya ke lembaga yang tepat, sehingga penyalurannya bisa berdaya guna secara tepat juga. □

TIDAK terbantahkan Yogya selama ini menyanggah predikat sebagai Kota Pelajar di negeri ini. Puluhan ribu pelajar dan mahasiswa setiap tahunnya berduyun-duyun belajar di sekolah atau perguruan tinggi di kota ini. Namun fakta mengejutkan datang dari release QS baru-baru ini yang tidak mencantumkan Yogya sebagai Kota Pelajar. QS, sebuah Lembaga pemeringkatan internasional, yang pada tahun 2022 ini menempatkan 3 kota di Indonesia sebagai kota pelajar, yaitu Bandung (peringkat 124), Jakarta (peringkat 126) dan Surabaya (peringkat 128). Mengapa hal ini bisa terjadi?

Untuk melakukan pemeringkatan, QS menggunakan 6 kriteria, yaitu: Pertama, *university rankings*, yaitu penilaian berdasarkan kuantitas perguruan tinggi yang ada di kota tersebut yang masuk ke dalam pemeringkatan QS World University Rankings dan menempati posisi terbaik. Untuk poin ini, Yogya cukup bersaing karena memiliki sejumlah PT berkualitas internasional, seperti: UGM, UMY, UII dan lainnya.

Aman

Kedua, *student mix*, yaitu penilaian terkait seberapa inklusif kota tersebut yang tercermin dari populasi mahasiswa yang majemuk secara internasional. Indikator ini tampaknya belum maksimal dijalankan, karena belum banyak lembaga pendidikan yang ada telah membuka program kelas internasional.

Ketiga, *desirability*, yaitu seberapa aman dan bagaimana tingkat polusi di kota itu. Untuk aspek ini, pengukuran dilakukan melalui survei kepada res-

Suranto

ponden terkait keinginan siswa belajar di kota tersebut. Hal yang perlu dikaji terkait aspek ini apakah beberapa kejadian kontraproduktif seperti fenomena



KR-JOKO SANTOSO

klithih dan konflik antarkelompok berpengaruh terhadap minat calon siswa belajar ke Yogya.

Keempat, *employer activity*, yaitu terkait ketersediaan lapangan kerja bagi kaum muda di kota tersebut, serta pendapat pengusaha terkait lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi di kota itu juga menjadi pertimbangan. Dalam aspek ini melihatnya Yogya masih belum optimal. Baik karena Yogya bukan kota industri juga karena budaya *low profile* yang sering dipandang kurang percaya diri bagi perusa-

Prospek Investasi Fintech

HARUS diakui, prospek industri teknologi keuangan atau *financial technology (fintech)* sangat menjanjikan di era milenium ini dan nanti. Hal ini didukung percepatan digitalisasi sejalan dengan perubahan gaya hidup dengan pandemi Covid-19. Jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan, inoveasi Fintech tak hanya mampu mengakselerasi industri keuangan kita. Tetapi sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha nasional, para investor kita

Banyak masyarakat telah mengadopsi *fintech*. Tercatat dari data OJK (2021) sudah lahir 208 platform *fintech* di Indonesia hanya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jumlah itu diyakini akan terus bertambah. Selain itu, penyelenggara *fintech* dan model bisnis-investasi *fintech* juga semakin beragam. Kontribusi *fintech* nasional terhadap pertumbuhan ekonomi pun semakin meningkat. Catatan World Bank menyebutkan *fintech* mampu mengakselerasi transaksi keuangan dan investasi hingga mencapai 35%.

Pendapatan Daerah

Perkembangan *fintech* tidak hanya didorong untuk transaksi keuangan, tapi juga pengumpulan pendapatan daerah dan dana sosial. *Fintech* pun didorong dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM mendapatkan pendanaan yang lebih efisien dan lebih mudah sehingga menjadi sumber pendanaan alternatif karena prosedurnya cepat, sederhana, dan mudah. Selain penyaluran pinjaman, *fintech* juga menawarkan digital investment platform seperti *insurtech*, reksadana, hingga pembelian surat utang dalam satu platform. Industri *fintech* telah segera memasuki babak baru. Sayangnya, tercatat baru sekitar 12% pelaku usaha mikro-kecil yang mampu dan mau mengakses platform *fintech*.

Perkembangan *fintech* yang sangat pesat itu sayangnya belum paralel dengan peran regulator dalam penegakkan hukum sekaligus literasi keuangan yang masih rendah di ranah

Tasroh

konsumen/publik. Regulasi yang tersedia pun masih amat terbatas dan berpeluang terjadinya banyak pelanggaran di lapangan. Kita baru memiliki regulasi dari OJK. Hal tersebut setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang sekaligus menggantikan POJK Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. †

Melalui POJK tersebut pemerintah akan lebih memperketat pengawasan terhadap perusahaan finansial berbasis teknologi pembiayaan bersama atau *fintech peer to peer lending (P2P lending)*. Sejumlah peraturan baru yang tertuang dalam POJK tersebut di antaranya, modal minimal perusahaan *fintech P2P lending* menjadi Rp 25 miliar dari sebelumnya hanya Rp 2,5 miliar. Perusahaan juga wajib setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit Rp 12,5 miliar. Kepemilikan asing pun juga masih diatur baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% dari modal disetor.

Batas Maksimum

POJK ini juga mengatur untuk penyelenggara baru langsung masuk dalam proses perizinan OJK. Sebelumnya, penyelenggara perlu melewati tahap status terdaftar dulu, baru berizin. Tak hanya itu, ada juga batas maksimum pendanaan oleh setiap pemberi dana dan afiliasinya paling banyak 25% dari posisi akhir pendanaan pada akhir bulan. Batas maksimum pendanaan kepada setiap penerima dana pun masih tetap Rp 2 miliar. Ke depan, OJK juga akan mengatur batas maksimal suku bunga bagi

haan skala global.

Biaya Kuliah

Kelima, *affordability* yaitu penilaian yang diukur dari biaya kuliah dan biaya hidup siswa di kota tersebut. Untuk ukuran biaya hidup dan biaya kuliah, Yogya menempati posisi yang baik. Karena baik biaya kuliah maupun biaya hidup cukup terjangkau dibandingkan kota lain.

Terakhir, *student voice*, yaitu penilaian berdasarkan pada pendapat pelajar mengenai keramahan kota, keberlanjutan, keragaman, dan lain-lainnya. Selain itu proporsi mereka yang tinggal di kota setelah lulus juga jadi penilaian dalam kategori ini. Yang harus diperhatikan dari aspek ini adalah kepuasan lulusan sekolah di Yogyakarta setelah menamatkan studinya. Kepedulian stakeholders tentang hal ini perlu ditingkatkan.

Semoga pada tahun mendatang, Yogya a dapat meningkatkan peringkatnya dengan menempuh serangkaian kebijakan yang bisa diambil baik oleh Pemprov DIY maupun Pemkot Yogyakarta. □

** Dr Suranto, Dosen Fisipol UMY | Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Sinetron Baru yang Semakin 'Liar'

SUDAH sebulan ini kita disuguhi sinetron baru, yang anehnya hampir di semua stasiun televisi. Kisah berjudul 'Kerajaan Sambo' yang sudah sebulan lebih juga belum menunjukkan tanda-tanda kemana arah ceritanya bermuara. Masyarakat mulai jengah karena kisahnya seakan diulur-ulur sehingga semakin jauh dari alur membongkar kematian Brigadir J. Mungkin sampai peringatan 40 hari Brigadir J, tanda ke sana seperti belum ada. Bahkan kisah sinetron baru ini terasa

semakin 'liar'.
Oke sekarang semua eboroki Sambo diungkap, ini tentu bagus. Apalagi ini sudah puluhan orang polisi dan petinginya diperiksa terkait kasus judi, narkoba dan lainnya. Rakyat hanya berharap jangan sampai lupakan kasus utama, pembunuhan yang dilakukan. Jangan sampai semua nanti akhirnya terbawa angin lalu. Kasihan Brigadir J dan juga keluarganya. □

Warga Sleman, nama dan alamat ada pada redaksi

BBM Naik, Rakyat Makin Menderita

BERITA mengenai harga BBM akan dinaikkan, sangat mengganggu kami rakyat kecil. Karena naiknya harga BBM tidak cukup 'hanya sekadar' naiknya harga BBM saja. Namun akan ada gerbong panjang yang mengikuti naik. Bahkan sekarang ramai-ramai ini dalam situasi yang disebut Wapres masih dalam pembahasan, harga kebutuhan sudah mulai merangkak. Sehingga ketika nanti diputuskan, harga-harga langsung akan meroket.

Yang memutuskan kenaikan harga BBM barangkali tidak akan

merasakan kenaikan harga lain yang mengikuti. Karena mungkin tidak pernah belanja sehari-sehari seperti kami rakyat kecil, yang memanfaatkan uang hasil bekerja kemarin untuk hari ini. Kalaupun ke pasar hanya untuk melakukan sidak, dan semua sudah dikondisikan. Yang muncul dari pedagang dan pembeli yang ditemui, pasti baik-baik. Kalaupun tidak, apa itu akan memengaruhi harga yang sudah dinaikkan? Rakyat betul-betul makin menderita. □

Warga Jolotundo Semarang

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongka Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, Wakil : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mubassaha, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakiid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustuti, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afiaty, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)